

**ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK SETELAH BERLAKUNYA AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PERIODE 2016-2018**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

GUSTIO GULANDA

2017-17133037

**PROGRAM STUDI DIPLOMA DIII AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA
SOLOK SETELAH BERLAKUNYA AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PERIODE
2016-2018**

Nama : Gustio Gulanda
NIM/BP : 17133037/2017
Program Studi : DIII Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, September 2020

**Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
DIII Akuntansi**



Halkadri Fitra, SE, MM. Ak
NIP. 19800809 201012 1 003

**Disetujui Oleh
Pembimbing**



Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc
NIP.

PENGESAHAN TUGAS AKHIR


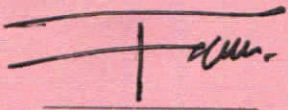

**ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA
SOLOK SETELAH BERLAKUNYA AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PERIODE
2016-2018**

NAMA : Gustio Gulanda
NIM : 17133037
Program Studi : Diploma III Akuntansi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

Padang, 2020

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc	(Ketua)	
2. Fefri Indra Arza, SE, M.Si.Ak	(Anggota)	
3. Halkadri Fitra, SE, MM. Ak	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gustio Gulanda
Tahun Masuk/NIM : 2017/17133037
Tempat/ Tgl Lahir : Solok/ 18 Agustus 1999
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Koto Hilalang, Sawah Sudut, Selayo, Kec. Kubung,
Kab Solok
No. Handphone : 082287695789
Judul Tugas Akhir : Analisis Pertumbuhan dan Kemandirian Keuangan Daerah
Kota Solok Setelah Berlakunya Akuntansi Berbasis Akrual
Periode 2016-2018

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah (diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagian acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini. Maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir serta sanksi lainnya secara aturan yang berlaku.

Padang, September 2020
Yang Menyatakan,



Gustio Gulanda
NIM. 17133037

ABSTRAK

Gustio Gulanda : Analisis Pertumbuhan dan Kemandirian

**Keuangan Daerah Kota Solok Setelah Berlakunya
Akuntansi Berbasis Akrual Periode 2016-2018**

Pembimbing : Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan kemandirian keuangan daerah pada Kota Solok setelah berlakunya akuntansi berbasis akrual periode 2016-2018 terdapat permasalahan yaitu: 1) Penerimaan pendapatan transfer atau dana perimbangan yang masih tinggi, 2) Kurangnya usaha pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada, 3) Pendapatan Asli Daerah tidak tergarap secara maksimal. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran kota solok periode 2016-2018 yang diperoleh dari website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kota Solok ditinjau dari: 1) Rasio Pertumbuhan keuangan daerah Kota Solok dari tahun 2016-2018 yang memiliki rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 3,9% dan Pertumbuhan Total Pendapatan 2,74%. 2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Solok dari tahun 2016-2018 memiliki rata-rata 7,87% dengan kriteria penilaian Rendah

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala berkah, rahmat, hidayah, serta pertolongan yang diberikan-Nya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan judul: **“Analisis Pertumbuhan dan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Solok Setelah Berlakunya Akuntansi Berbasis Akrual Tahun 2016- 2018.”** tepat pada waktunya, serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan akhlakulkarimah bagi seluruh muslim di seluruh penjuru dunia.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis sudah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta dukungan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan senang hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran disetiap kesulitan yang penulis hadapi.
2. Teristimewa kepada kedua Orang tua, Benhur Luba dan Ibunda Rita serta kakak penulis, Winda Abeta Putri yang telah memberikan kesungguhan do'a, bantuan moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Ibu Dian Fitria Handayani SE, M.Sc. selaku Pembimbing Tugas Akhir yang

telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan serta arahan yang bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan waktu yang telah ditentukan.

4. Bapak Dr. Idris M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
5. Bapak Halkadri Fitra SE,MM,Ak,CA selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan program studi DIII FE UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Sahabat-sahabat penulis yaitu Aisyah Gayatri, Atifa Cindy, Cici Vadila, Fhammela Liberty Hanna, dan Gina Rahmawati yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan saran yang berguna bagi penulis.
8. Dan semua teman-teman seperjuangan khususnya D3 Akuntansi 2017 yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan seluruh kemampuan, namun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan

saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari semua pihak penulis ucapkan terimakasih.

Padang, 2020

Gustio Gulanda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Otonomi Daerah.....	13
1. Keuangan Daerah.....	16
2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	17
3. Pengelolaan Keuangan Daerah	19
4. Laporan Keuangan Daerah	22
C. Analisis Kinerja Keuangan Daerah	28
D. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah	32
1. Standar Akuntansi Pemerintahan.....	32
2. Basis Akuntansi	33
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	36
A. Bentuk Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
1. Lokasi Penelitian	37
2. Waktu Penelitian.....	37
C. Rancangan Penelitian	37
1. Jenis Penelitian	37

2. Tahapan Penelitian.....	38
3. Objek Penelitian.....	39
4. Sumber Data Penelitian	39
5. Teknik Analisis Data	40
BAB IV PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Instansi.....	42
1. Sejarah Singkat Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Barat	42
2. Tugas	43
3. Sejarah Singkat Kota Solok	46
4. Visi dan Misi.....	50
B. Temuan dan Pembahasan	51
1. Analisis Pertumbuhan.....	51
2. Analisis Kemandirian	54
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Pendapatan Kota Solok Tahun Anggaran 2016-2018	8
Tabel 2.0 Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah	30
Tabel 4.1 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2016-2018.....	51
Tabel 4.2 Tingkat Kemandirian Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2016-2018.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Kota Solok Tahun 2016

Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Kota Solok Tahun 2017

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Kota Solok Tahun 2018

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia saat ini menuntut pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bukan hanya untuk perusahaan namun juga untuk pemerintahan. Praktik pelaporan laporan keuangan yang transparan mengacu pada standar akuntansi yang dapat diperbandingkan secara internasional. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan dengan tepat mengenai standar akuntansi yang digunakan (Hidayah,2019).

Menurut Bastian (2010:138) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia.

Menurut Sinaga (2010:8), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis dan dengan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif serta akuntabilitas sehingga memiliki kredibilitas, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yaitu mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Kerangka konseptual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan instrument dan tata tertib yang mengatur mengenai mekanisme dan standar pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta transaksi selama satu periode tahun anggaran.

Penyajian laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, melihat kondisi keuangan pemerintah daerah, melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta memastikan ketaatan penyajian serta kesesuaian penyajian laporan menurut kaidah peraturan perundang-undangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dan dijadikan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban ini bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah merupakan peluang sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintah daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan.

Sejatinya suatu daerah harus mampu membiayai seluruh keperluan daerahnya namun setiap daerah memiliki keterbatasan sumber daya yang berbeda-beda. Adanya keterbatasan ini menyebabkan perbedaan kemakmuran antar setiap daerah, untuk itu campur tangan pemerintah pusat dibutuhkan dalam bentuk kucuran dana perimbangan meskipun porsi masing-masing daerah berbeda-beda. Besarnya kucuran dana dari pemerintah pusat tergantung dari besarnya pendapatan asli daerah yang direalisasikan oleh pemerintah daerah atau berdasarkan kebutuhan dan kapasitas daerah misalnya dana alokasi umum.

Kemandirian keuangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperolehnya dalam memenuhi seluruh kebutuhan belanja pemerintah, baik belanja operasional maupun belanja modal, semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerahnya, demikian juga sebaliknya semakin sedikit belanja yang dapat dipenuhi dengan pendapatan asli daerah, maka semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri, apabila daerah tersebut tidak lagi

bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat, untuk itu suatu daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam suatu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah dapat diukur berdasarkan jumlah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain, Pendapatan Asli Daerah yang sah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan.

Analisis laporan keuangan merupakan cara yang dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah secara lebih rinci (Mahmudi, 2016:89). Mahmudi (2016:13) mengungkapkan bahwa tidak semua orang bisa membaca laporan keuangan, untuk itu perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan dengan menerjemahkan informasi laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan dan bagaimana mengevaluasi laporan keuangan serta mengetahui kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan memerlukan teknik tertentu, teknik analisis laporan keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diantaranya yang dapat digunakan yaitu, analisis pertumbuhan pendapatan dan analisis rasio kemandirian.

Analisis Pertumbuhan adalah analisis yang mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari suatu periode ke periode berikutnya. Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau

negatif (Mahmudi,2010). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.

Rasio Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan dari luar atau eksternal. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian daerahnya. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Keberhasilan suatu daerah tercermin dari pendapatan asli daerah yang meningkat setiap tahunnya dan pertumbuhan ekonomi pada setiap sektor yang membaik, sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari berapa besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. Pendapatan Asli Daerah tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga dari potensi daerah itu

sendiri. Berikut pendapatan daerah Kota Solok dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018:

Tabel 1.1

Total Pendapatan Kota Solok Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun	Total Pendapatan Daerah	PAD	Pendapatan Transfer
2016	573.544.451.667,98	42.117.207.737,98	529.889.403.310,00
2017	597.241.847.253,12	41.852.774.058,12	542.153.975.616
2018	565.850.388.710,40	40.742.809.270,40	513.726.694.440

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan RI Sumatera Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan total pendapatan daerah, pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer pada Kota Solok dalam tiga tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang mengalami perubahan setiap tahunnya. Namun perubahan tersebut belum menggambarkan bagaimana rasio kemandirian dan pertumbuhan Kota Solok dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, apakah rasio kemandirian dan pertumbuhan mengalami peningkatan atau penurunan dan bagaimana kemampuan keuangan daerahnya berdasarkan rasio kemandirian dan pertumbuhan, apakah masuk kategori rendah sekali, rendah, sedang atau tinggi. Oleh karena itu penulis merasa perlu dilakukan analisis kemandirian dan pertumbuhan keuangan daerah Kota Solok pada tahun 2016-2018. Pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan rasio kemandirian dan pertumbuhan penting sekali dilakukan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan serta untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan kinerjanya.

Kota Solok merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pertanian adalah salah satu potensi ekonomi utama, kota Solok yang dapat menggerakkan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Peran pertanian dalam perekonomian daerah tergambar dari kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain pertanian, sampai saat ini di Kota Solok terdapat lingkungan pasar yang masih aktif beroperasi. Aktivitas pasar dapat memberikan kontribusi besar bagi PAD Kota Solok berupa retribusi. Agar penerimaan retribusi pasar optimal, maka pemerintah daerah perlu memanfaatkan potensi yang ada di pasar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2016 bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok khususnya retribusi jasa usaha yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kota Solok melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha dengan menambahkan objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah

Pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kota Solok menetapkan akuntansi berbasis akrual untuk pertama kalinya sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP adalah peraturan pemerintah yang fundamental yang mengusung amanat penerapan akuntansi berbasis akrual selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan pemerintah tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis tingkat pertumbuhan dan kemandirian keuangan daerah Kota Solok setelah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Analisis Pertumbuhan dan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Solok Setelah Berlakunya Akuntansi Berbasis Akrual Periode 2016-2018”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat didefinisikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Kota Solok berdasarkan pertumbuhan keuangan daerahnya pada periode 2016-2018 setelah berlakunya akuntansi berbasis akrual ?
2. Bagaimana kinerja Pemerintah Kota Solok berdasarkan kemandirian keuangan daerahnya pada periode 2016-2018 setelah berlakunya akuntansi berbasis akrual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Solok pada periode 2016-2018 setelah berlakunya akuntansi berbasis akrual.
2. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan keuangan daerah Kota Solok pada periode 2016-2018 setelah berlakunya akuntansi berbasis akrual.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan informasi maupun bahan pertimbangan berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi penulis

Untuk menemukan bukti empiris tentang kemandirian keuangan pemerintah daerah yang diteliti, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan referensi dalam menganalisis kemandirian dan pertumbuhan keuangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan

keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan yang berguna dalam menambah pengetahuan dan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2016-2018 berdasarkan perhitungan pertumbuhan pendapatan pengelolaan keuangan daerah dikategorikan kurang baik, karena terjadi penurunan pendapatan selama tahun anggaran, artinya kinerja keuangan pemerintah daerah kota Solok masih belum bisa mempertahankan ataupun meningkatkan kinerja keuangan daerahnya.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2016-2018 berdasarkan tingkat kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instruktif karena masih berkisar antara 0%-25%.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran berkenaan dengan pertumbuhan pendapatan dan kemandirian keuangan daerah Kota Solok sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Solok diharapkan agar dapat memaksimalkan perolehan PAD melalui penggalian sumber-sumber baru penerimaan daerah kendati jumlah bantuan dana dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih cukup besar.
2. Pemerintah Kota Solok mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki melalui salah satunya peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan perluasan tempat dan waktu penelitian, serta dengan menggunakan alat pengukuran/rasio lainnya sebagai alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Julinar. 2019. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2017)*.<http://repository.unpas.ac.id/35508/5/BAB%20II.pdf>(Akses tanggal 21 Maret 2020)
- Fathah, R. N. 2017. Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 33-48.
- Fitra, Halkadri. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang
- Fitra, Halkadri. "Penggunaan Laporan Keuangan Untuk Melihat Gambaran Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kotamadya di Pulau Sumatera." *Wahana Riset Akuntansi* 6.1 (2018).
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)* . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hendawati, Henda., Komarasakti, D., dan Ansori, S. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1643-1656.
- Hidayah, Dini Noer. 2019. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintahan Daerah*. <https://www.jtanzilco.com/> (Akses tanggal 21 Maret 2020)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Solok (diakses tanggal 18 Mei 2020)
- https://padang.bpk.go.id/?page_id=46 (diakses tanggal 18 Mei 2020)
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jakarta (ID): RI* (2014).
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jakarta (ID): RI* (2004).
- Kaunang, C. E., Naukoko, A. T., & Londa, A. T. 2016. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah (Studi Pada Kota Manado Tahun 2010-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.